

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM PROSES PEMBANGUNAN PASAR SMEP KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus: DPRD Kota Bandar Lampung)

Oleh

DWI HARYANTI

Indonesia merupakan negara demokrasi. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokrasi maka pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya. Dengan begitu, maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif. Oleh karena itu, keduanya memiliki andil yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk mengatasi fenomena dan permasalahan mengenai tertundanya proses pembangunan Pasar Smep yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung dalam proses pembangunan Pasar

Smep. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta dengan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan tahap pemeriksaan data atau editing dan interpretasi data. Teknik analisis data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat 1 (c) tentang tugas dan wewenang DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRD.